

Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Inovasi Layanan Publik Berbasis Smart Village di Kabupaten Lombok Barat

Nuridah¹, Arif Hidayatullah², Rahmawati³, Inka Nusamuda Pratama⁴

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

e-mail: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan konsep Smart Village di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan pustaka deskriptif kualitatif dengan mengkaji berbagai sumber literatur akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan data statistik dari BPS, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat menghadapi tantangan dalam pelayanan publik konvensional dengan tingkat kepuasan masyarakat yang baru mencapai 72,4%, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital melalui RPJMD 2021-2026 yang menargetkan 100% desa menjadi smart village pada tahun 2026. Program unggulan meliputi pengembangan aplikasi Lombok Barat Satu (Lobar Satu) dengan 47 layanan digital, sistem e-Government dengan 85% layanan terintegrasi, serta pembangunan 115 desa digital dengan akses internet berkecepatan tinggi. Namun, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat (48,3%), keterbatasan anggaran teknologi informasi yang hanya 2,1% dari total APBD, dan lemahnya koordinasi antar-OPD dalam integrasi sistem. Penelitian ini merekomendasikan penguatan ekosistem digital desa melalui peningkatan literasi digital, perluasan infrastruktur broadband, penguatan kolaborasi multi-stakeholder, dan pengembangan model smart village yang adaptif terhadap karakteristik lokal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, efisien, dan berbasis data.

Kata kunci: E-Government, Lombok Barat, Inovasi Layanan Publik, Smart Village, Transformasi Digital, Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di era *Society 5.0*, dimana teknologi informasi dan komunikasi diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia, agenda transformasi digital pemerintahan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi SPBE diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel (Kementerian PANRB, 2023).

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik. Dengan luas wilayah 1.053,92 km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 115 desa/kelurahan, serta jumlah penduduk mencapai 721.481 jiwa pada tahun 2023, Kabupaten Lombok Barat menghadapi tantangan dalam pemerataan akses layanan publik, terutama di wilayah perdesaan yang terpencil (BPS Lombok Barat, 2023). Kondisi geografis dengan topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga pegunungan menyebabkan kesenjangan aksesibilitas antara wilayah perkotaan di Kecamatan Gerung dan wilayah perdesaan di kaki Gunung Rinjani.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik konvensional baru mencapai 72,4%, masih di bawah target nasional sebesar 85%. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi lamanya waktu pengurusan dokumen administrasi yang rata-rata membutuhkan 5-7 hari kerja, rendahnya transparansi dalam proses pelayanan, terbatasnya akses informasi publik terutama di desa-desa terpencil, dan lemahnya sistem pengaduan masyarakat yang responsif. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya praktik pelayanan manual yang memerlukan kehadiran fisik masyarakat ke kantor pemerintahan, sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Di sisi lain, penetrasi teknologi digital di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data Survei Indikator TIK 2023 mencatat bahwa kepemilikan *smartphone* di wilayah ini mencapai 78,2% dari total penduduk, dengan pengguna internet aktif sebesar 64,5%. Namun, terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, akses internet mencapai 89,3%, sementara di wilayah perdesaan hanya 52,7%. Kondisi infrastruktur telekomunikasi juga masih terbatas, dimana dari 115 desa/kelurahan yang ada, baru 68 desa (59,1%) yang memiliki akses internet 4G dengan kecepatan memadai (Kominfo Kabupaten Lombok Barat, 2023).

Tabel 1. Kondisi Pelayanan Publik dan Infrastruktur Digital di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

No.	Indikator	Keterangan / Nilai	Sumber
1	Jumlah penduduk	721.481 jiwa	BPS Lombok Barat, 2023
2	Jumlah desa/kelurahan	115 desa/kelurahan	Permendagri No. 72/2019
3	Tingkat kepuasan layanan publik	72,4%	Diskominfo Lobar, 2023
4	Rata-rata waktu pengurusan dokumen	5-7 hari kerja	Survey Kemenpan RB, 2023
5	Penetrasi <i>smartphone</i>	78,2%	Survei Indikator TIK, 2023
6	Pengguna internet aktif	64,5%	APJII, 2023
7	Desa dengan akses internet 4G	68 desa (59,1%)	Kominfo Lobar, 2023
8	Tingkat literasi digital	48,3%	Kemendikbudristek, 2023
9	Alokasi anggaran TI dalam APBD	2,1%	BPKAD Lobar, 2023
10	Jumlah layanan digital terintegrasi	47 layanan	Diskominfo Lobar, 2023

Sumber: Berbagai sumber (BPS Lombok Barat, Diskominfo, Kemenpan RB, APJII, 2023)

Tantangan transformasi digital di daerah tidak hanya terkait dengan ketersediaan

infrastruktur teknologi, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan masyarakat. Hasil penilaian SPBE Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 menunjukkan skor 2,47 dari skala 5,0 dengan predikat "Baik", namun masih perlu peningkatan signifikan untuk mencapai level "Sangat Baik" (Kementerian PANRB, 2022). Aspek yang masih lemah meliputi integrasi sistem antar-OPD yang baru mencapai 45%, keamanan informasi yang belum tersertifikasi ISO 27001, dan belum adanya arsitektur SPBE yang komprehensif. (Iswanto & Miskan, 2025)

Konsep Smart Village muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbeda dengan Smart City yang fokus pada kawasan perkotaan, *Smart Village* dirancang khusus untuk konteks perdesaan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Menurut *European Network for Rural Development* (ENRD, 2018), *Smart Village* adalah desa yang mengembangkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan ketahanan di wilayah perdesaan, memanfaatkan kekuatan dan aset lokal serta menciptakan peluang baru melalui layanan yang lebih baik, infrastruktur digital, dan penggunaan teknologi yang bijak.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menunjukkan komitmen dalam mengakselerasi transformasi digital melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2021-2026 menetapkan visi "Lombok Barat Maju, Sejahtera, dan Religius Berbasis Smart Village" dengan salah satu misi utama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional berbasis teknologi informasi. Target ambisius yang ditetapkan adalah mencapai 100% desa menjadi *smart village* pada tahun 2026, dengan indikator keberhasilan meliputi peningkatan indeks SPBE menjadi 4,0, kepuasan layanan publik mencapai 90%, dan pengurangan waktu pelayanan menjadi maksimal 2 hari kerja. (Dwi Nurfaishal et al., 2024)

Berbagai inovasi telah dikembangkan, seperti aplikasi Lombok Barat Satu (Lobar Satu) yang mengintegrasikan 47 jenis layanan publik dalam satu platform digital, sistem e-Planning dan *e-Budgeting* untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pengembangan *Command Center* untuk monitoring dan evaluasi pembangunan secara *real-time*. Di tingkat desa, telah dibangun 68 desa digital yang dilengkapi dengan akses internet, website desa, sistem informasi desa, dan pelatihan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat.

Namun, implementasi program *smart village* masih menghadapi berbagai kendala kompleks. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Mataram (2023) mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial, antara lain: (1) keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil yang menyebabkan 41% desa belum memiliki akses internet memadai; (2) rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur desa yang baru mencapai 48,3%; (3) keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi yang hanya 2,1% dari total APBD; (4) lemahnya koordinasi dan integrasi sistem antar-OPD yang menyebabkan silo data dan duplikasi sistem; serta (5) resistensi perubahan (*change resistance*) dari sebagian aparatur yang masih nyaman dengan sistem manual. (Wahyiah, 2025)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *good governance* dan *innovation theory* untuk menganalisis implementasi *smart village* di Kabupaten Lombok Barat. Kerangka *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Sementara itu, *innovation theory* membantu memahami proses difusi inovasi, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi, dan strategi untuk mengatasi hambatan inovasi di sektor publik (Rogers, 2003).

Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *smart village* di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan transformasional, ekosistem digital yang

konduusif, kolaborasi multi-stakeholder, dan pendekatan *bottom-up* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman dari negara-negara Eropa seperti Austria, Belanda, dan Spanyol menunjukkan bahwa smart village yang sukses adalah yang mampu mengintegrasikan tiga pilar utama: (1) infrastruktur dan konektivitas digital; (2) layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan lokal; dan (3) pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas digital (European Commission, 2019).

Penelitian tentang transformasi digital di pemerintahan daerah Indonesia telah banyak dilakukan, namun studi yang secara khusus menganalisis implementasi *smart village* dalam konteks daerah kepulauan dengan karakteristik geografis dan sosio-ekonomi yang spesifik masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada Kabupaten Lombok Barat sebagai kasus yang menarik karena: (1) memiliki komitmen kuat dalam pengembangan *smart village* sebagaimana tertuang dalam RPJMD; (2) telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital yang dapat menjadi *best practice*; (3) menghadapi tantangan khas daerah kepulauan yang memerlukan solusi kontekstual; dan (4) memiliki potensi untuk menjadi model bagi kabupaten/kota lain di Indonesia Timur.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam implementasi transformasi digital melalui konsep *smart village* sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan inovasi layanan publik. Fokus penelitian meliputi: (1) identifikasi kebijakan dan program *smart village* yang telah diimplementasikan; (2) evaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kualitas layanan publik; (3) analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi; serta (4) perumusan rekomendasi strategis untuk optimalisasi *smart village* yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tinjauan pustaka yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan transformasi digital pemerintahan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi transformasi digital melalui konsep *smart village* dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber literatur secara sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Snyder, 2019).

Data dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi: (1) jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks pada database akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan DOAJ dengan kata kunci "*smart village*", "transformasi digital", "*e-government*", "inovasi layanan publik"; (2) dokumen kebijakan pemerintah termasuk RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2021-2026, Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Rencana Induk *Smart Village*; (3) laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika; (4) publikasi hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB; serta (5) artikel dan laporan dari lembaga penelitian terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Transformasi Digital

Hasil analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengembangkan kerangka kebijakan transformasi digital yang cukup komprehensif. Landasan utama adalah RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2021-2026 yang

menetapkan visi "Lombok Barat Maju, Sejahtera, dan Religius Berbasis Smart Village". Visi ini dijabarkan dalam Misi ke-5 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi."

Kebijakan transformasi digital diperkuat melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur tentang arsitektur, tata kelola, manajemen, layanan, dan audit SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Peraturan ini menjadi payung hukum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dokumen strategis lainnya adalah Rencana Induk Smart Village Kabupaten Lombok Barat 2022-2026 yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen ini menetapkan roadmap pengembangan *smart village* dengan target 115 desa/kelurahan menjadi *smart village* pada tahun 2026, dengan tahapan: (1) Tahap Rintisan (2022-2023): 68 desa; (2) Tahap Pengembangan (2024-2025): 100 desa; dan (3) Tahap Konsolidasi (2026): 115 desa.

Strategi transformasi digital yang dikembangkan mencakup lima pilar utama:

1. Penguatan Infrastruktur Digital

Fokus pada pembangunan dan perluasan jaringan internet broadband ke seluruh desa melalui program Jaringan Fiber Optik Terpadu (JARLOKTA) dan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah blank spot. Target yang ditetapkan adalah 100% desa memiliki akses internet dengan kecepatan minimal 20 Mbps pada tahun 2026. Hingga tahun 2023, telah dibangun 47 titik akses WiFi publik gratis di berbagai lokasi strategis seperti kantor desa, balai desa, dan ruang publik lainnya.

2. Pengembangan Platform Layanan Digital Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengembangkan aplikasi Lombok Barat Satu (Lobar Satu) sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform. Aplikasi ini diluncurkan pada Januari 2022 dan terus dikembangkan hingga kini memiliki 47 jenis layanan meliputi: (1) Layanan administrasi kependudukan (e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran). (2) Layanan perizinan usaha (OSS Daerah). (3) Layanan kesehatan (pendaftaran online, rekam medis elektronik). (4) Layanan pendidikan (PPDB online, rapor digital). (5) Layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah. (6) Pengaduan masyarakat. (7) Informasi pembangunan dan program pemerintah. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (2023) menunjukkan bahwa aplikasi Lobar Satu telah diunduh oleh 184.532 pengguna (25,6% dari total penduduk) dengan rata-rata transaksi layanan mencapai 12.847 transaksi per bulan. Tingkat kepuasan pengguna aplikasi mencapai 83,7%, meningkat signifikan dibandingkan tingkat kepuasan layanan konvensional yang hanya 72,4%.

3. Digitalisasi Sistem Manajemen Pemerintahan

Implementasi sistem *e-Government* internal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pemerintahan meliputi: (1) *E-Planning*: Sistem perencanaan pembangunan berbasis aplikasi yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. (2) *E-Budgeting*: Sistem penganggaran elektronik yang transparan dan akuntabel. (3) *E-Procurement*: Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE. (4) *E-Office*: Sistem persuratan dan manajemen dokumen elektronik. (5) *E-Kinerja*: Sistem penilaian kinerja aparatur berbasis digital. (6) *E-Monitoring*: Command Center untuk monitoring dan evaluasi program pembangunan secara real-time.

Tingkat integrasi sistem *e-Government* antar-OPD mencapai 85% pada tahun 2023,

meningkat dari 45% pada tahun 2021. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi birokrasi dengan pengurangan waktu proses administrasi rata-rata 60%.

4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Digital

Program literasi digital dilaksanakan secara masif melalui: Pelatihan Digital Skills bagi aparatur desa dan masyarakat yang telah menjangkau 8.450 peserta, Gerakan Desa Digital yang melibatkan relawan digital di setiap desa, Kampanye penggunaan aplikasi Lobar Satu melalui media sosial dan *roadshow*, Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pendampingan teknis, Pembentukan Digital Champion di setiap desa sebagai agen perubahan.

Namun, tingkat literasi digital masyarakat yang baru mencapai 48,3% menunjukkan bahwa program ini perlu terus diintensifkan terutama untuk kelompok lansia dan masyarakat berpendidikan rendah.

5. Kolaborasi Multi-Stakeholder

Pengembangan *smart village* melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak: (1). Kementerian Komunikasi dan Informatika: bantuan infrastruktur dan pelatihan. (2). Provider telekomunikasi (Telkom, Indosat, XL): perluasan jaringan. (3). Perguruan tinggi: penelitian dan pengembangan aplikasi. (4) Sektor swasta: investasi teknologi melalui skema CSR. (5). Komunitas digital: relawan pendampingan masyarakat.

Tabel 2. Program Transformasi Digital di Kabupaten Lombok Barat

Program	Target/Capaian	Tantangan
Aplikasi Lobar Satu	47 layanan, 184.532 pengguna	Adopsi pengguna masih 25,6%, perlu sosialisasi masif
Desa Digital	68 desa (2023), target 115 desa (2026)	41% desa belum memiliki akses internet memadai
WiFi Publik Gratis	47 titik akses	Kualitas dan stabilitas koneksi perlu ditingkatkan
E-Government	85% layanan terintegrasi	Masih ada silo sistem di beberapa OPD
Literasi Digital	8.450 peserta terlatih	Tingkat literasi masyarakat baru 48,3%
Command Center	1 unit operasional	Integrasi data real-time dari desa belum optimal

Sumber: Diskominfo Lombok Barat, 2023; BAPPEDA Lombok Barat, 2023

Implementasi *Smart Village*: Model dan Inovasi Layanan Publik

Konsep *smart village* yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat mengadopsi model *Triple Helix Innovation* yang melibatkan sinergi antara pemerintah (*government*), akademisi (*academia*), dan bisnis/komunitas (*business/community*). Model ini berbeda dengan pendekatan *top-down* konvensional karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perancangan solusi, hingga implementasi program.

Berdasarkan karakteristik dan tingkat kesiapan, desa-desa di Kabupaten Lombok Barat dikategorikan menjadi tiga klaster:

Klaster 1 - Smart Village Mandiri (20 desa)

Desa yang telah memiliki infrastruktur digital memadai, tingkat literasi digital tinggi (60%), dan telah mengimplementasikan berbagai inovasi layanan digital secara mandiri. Contoh: Desa Sesaot, Desa Lembar, Desa Sekotong Tengah.

Inovasi unggulan: 1). Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan *website* desa. 2). E-

Village Budgeting untuk transparansi APBDes. 3). *Smart Agriculture*: sistem monitoring pertanian berbasis IoT dan drone. 4). *E-Commerce* desa untuk pemasaran produk UMKM lokal. 5). Telemedicine untuk layanan kesehatan jarak jauh.

Klaster 2 - *Smart Village* Berkembang (48 desa)

Desa yang sedang dalam proses transformasi digital dengan dukungan intensif dari pemerintah kabupaten. Telah memiliki infrastruktur dasar namun masih memerlukan pendampingan dalam pengembangan aplikasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Program prioritas: 1).Pembangunan Balai Rakyat Digital sebagai pusat literasi digital, 2).Implementasi aplikasi Lobar Satu untuk layanan administrasi desa, 3).Pelatihan aparatur desa dalam penggunaan sistem *e-Government*, 4).Pengembangan konten digital untuk promosi potensi wisata dan ekonomi.

Klaster 3 - *Smart Village* Rintisan (47 desa)

Desa yang baru memulai transformasi digital dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses internet. Mayoritas berada di wilayah terpencil dengan tingkat literasi digital rendah (<40%).

Intervensi utama: 1).Pembangunan infrastruktur jaringan internet (BTS 4G, fiber optik), 2).Bantuan perangkat komputer dan tablet untuk kantor desa, 3).Pelatihan dasar literasi digital untuk aparatur dan masyarakat, 4).Sosialisasi manfaat teknologi digital dalam pelayanan publik.

Salah satu best practice adalah Desa Sesaot yang telah menjadi desa wisata digital. Desa ini mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan pariwisata melalui aplikasi Sesaot *Smart Tourism* yang menyediakan informasi destinasi wisata, pemesanan *homestay*, pemandu wisata virtual, dan pembayaran *cashless*. Aplikasi ini telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 35% dan pendapatan masyarakat dari sektor wisata meningkat 42% dalam dua tahun terakhir. Inovasi lain yang menarik adalah *Smart* Posyandu di Desa Lembar yang menggunakan aplikasi mobile untuk pencatatan data kesehatan ibu dan anak, *reminder* jadwal imunisasi melalui SMS, dan konsultasi kesehatan online dengan tenaga medis. Program ini berhasil meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 78% menjadi 94% dan menurunkan angka stunting dari 18,5% menjadi 12,3%.

KESIMPULAN

Implementasi transformasi digital melalui konsep *Smart Village* di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Hal ini tercermin dari kerangka kebijakan yang komprehensif dalam RPJMD 2021-2026 yang menargetkan 100% desa menjadi *smart village* pada tahun 2026, diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang SPBE dan Rencana Induk *Smart Village* 2022-2026. Program transformasi digital telah menghasilkan berbagai inovasi layanan publik yang signifikan, meliputi aplikasi Lombok Barat Satu (Lobar Satu) dengan 47 layanan digital terintegrasi, pembangunan 68 desa digital, pengembangan sistem *e-Government* dengan tingkat integrasi 85%, dan pembangunan 47 titik akses WiFi publik gratis yang berhasil meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan digital menjadi 83,7%.

Model *Smart Village* yang dikembangkan mengadopsi pendekatan *Triple Helix* Innovation yang melibatkan sinergi pemerintah, akademisi, dan komunitas, dengan kategorisasi desa menjadi tiga klaster berdasarkan tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital, yaitu *Smart Village* Mandiri (20 desa), *Smart Village* Berkembang (48 desa), dan *Smart Village* Rintisan (47 desa). Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing desa. Beberapa *best practice* seperti Desa

Sesaot sebagai desa wisata digital dan Smart Posyandu di Desa Lembar menunjukkan dampak positif transformasi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.

Meskipun telah menunjukkan capaian yang mengembirakan, implementasi *smart village* di Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital di 41% desa yang belum memiliki akses internet memadai, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat yang baru mencapai 48,3%, keterbatasan alokasi anggaran teknologi informasi yang hanya 2,1% dari total APBD, masih adanya silo sistem di beberapa OPD, serta resistensi perubahan dari sebagian aparatur yang masih nyaman dengan sistem manual. Keberhasilan implementasi *smart village* sangat ditentukan oleh keselarasan antara aspek teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga peningkatan literasi digital secara masif, penguatan kolaborasi multi-stakeholder, peningkatan alokasi anggaran untuk teknologi informasi, serta pengembangan model *smart village* yang adaptif terhadap karakteristik lokal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

REFERENSI

- Addiansyah, R., Sulisty, H., & Pratama, A. (2024). Smart Village and Public Service Innovation in Endemic Times: Learning From Mojowarno Village. *Journal of Public Administration Studies*, 9(1), 45-62.
- Aidin, M. (2022). Transformasi Digital Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Desa: Kajian Pustaka. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 134-152.
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2023). Laporan Survei Internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII.
- BPKAD Lombok Barat. (2023). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Gerung: BPKAD Kabupaten Lombok Barat.
- BPS Lombok Barat. (2023). Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2023. Gerung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.
- Cahaya, T., Aris, U., Pranacitra, R., & Suriyanto, S. (2024). Smart Governance: Program Transformasional Digital Nasional Melalui Desa, Siapkah Indonesia. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 11(1), 23-41.
- Dana, G., Yuniari, N., & Raharja, I. (2025). Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 78-95.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2023. Gerung: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat.
- European Commission. (2019). Smart Villages: Revitalising Rural Services. *EU Rural Review* No. 26. Brussels: European Commission.
- European Network for Rural Development (ENRD). (2018). Smart Villages: Concept, Issues and Prospects for EU Rural Areas. Brussels: ENRD.
- Hombone, E. (2025). Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(1), 112-128.
- Iswanto, D. (2025). From Smart City to Smart Village: Akselerasi Transformasi Digital dalam Optimalisasi Pelayanan Publik di Desa Kepatihan Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 201-218.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Survei Indikator TIK 2023. Jakarta:

- Kemenkominfo.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Hasil Evaluasi SPBE 2022. Jakarta: Kemenpan RB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2023. Jakarta: Kemenpan RB.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Indeks Literasi Digital Indonesia 2023. Jakarta: Kemendikbudristek.
Mayyora, A., Pratama, R., & Susanto, D. (2023). Transformasi Digital Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Literature Review. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(3), 267-285.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2021-2026. Gerung: Bappeda Kabupaten Lombok Barat.
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Gerung: Pemkab Lombok Barat.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Sekretariat Negara.
Reftyawati, D., & Rusiana, A. (2023). Smart Village: Inovasi Layanan Surat-Menyurat Digital di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 6(2), 145-162.
Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
Siregar, J. E. (2024). Kapabilitas Digital dalam Upaya Transformasi Menuju Smart Village pada Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Desa Sepakung. *Jurnal Digital Government*, 9(2), 189-206.
Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
Universitas Muhammadiyah Mataram. (2023). Laporan Penelitian Pendahuluan: Evaluasi Implementasi Smart Village di Kabupaten Lombok Barat. Mataram: UMMat.
Widiyarta, A., & Haniyuhan, A. (2024). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat pada Implementasi Program Smart Village dalam Perspektif Smart Governance. *Jurnal Governance*, 12(2), 187-197. www.journal.uta45jakarta.ac.id
Yuliana, R. A., & Natalia, N. (2025). Transformasi Digital Desa Pongkok: Tantangan dan Potensi Menuju Desa Pintar yang Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Perdesaan*, 11(1), 56-73
12(2), 187–197. www.journal.uta45jakarta.ac.id